

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan membuktikan bahwa penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Efektivitas lembaga pemberantasan korupsi sering kali terganggu oleh berbagai faktor, seperti tekanan politik, revisi regulasi yang melemahkan, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, hukuman yang tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi membuat banyak pihak menilai bahwa sistem peradilan di Indonesia belum cukup tegas dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, penelitian mengenai korupsi di Indonesia menjadi sangat penting untuk mengkaji penyebab, dampak, serta solusi yang dapat diterapkan guna memperkuat sistem pemberantasan korupsi di negara ini. (Kompasiana, 2024).

Tabel 1.1. Data Berita Korupsi di Indonesia

No	Kasus	Tahun	Tersangka Utama		Kerugian Negara	Keterangan
1.	Korupsi Pertamina	2018-2023	CEO Pertamina Internasional Shipping, Direktur Kilang Pertamina Internasional	Patra Niaga, CEO Pertamina	Rp193,7 triliun (US\$12 miliar)	Dugaan impor minyak mentah dengan harga lebih mahal dibanding produksi dalam negeri, serta pencampuran Peralitedengan Pertamax untuk keuntungan pribadi.
2.	Kasus Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)	2025	Hasto Harun (buron)	Kristiyanto (Sekjen PDIP), Masiku	Tidak disebutkan	Dugaan suap kepada pejabat pemilu tahun 2019 untuk memenangkan politikus pilihan serta upaya menghalangi proses hukum.
3.	Kasus Korupsi Thomas Lembong (Mantan Menteri Perdagangan)	2024	Thomas Lembong	Trikasih	US\$25 Juta	Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam izin impor 105.000 metrik ton gula tanpa rekomendasi resmi, mengakibatkan surplus gula yang merugikan

4.	Penggeledahan Bank Indonesia oleh KPK	2024	Pejabat Bank Indonesia (termasuk Perry Warjiyo – Gubernur BI)	Tidak disebutkan	negara. Dugaan penyalahgunaan dana program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk keuntungan pribadi.
5.	Kasus Korupsi Timah (Harvey Moeis)	2024	Harvey Moeis, Pejabat PT Timah	Rp271 Triliun	Dugaan korupsi terkait tata kelola tambang timah ilegal yang menyebabkan kerugian negara sangat besar. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memberantas korupsi dengan membentuk berbagai regulasi dan lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan lembaga auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, meskipun berbagai tindakan hukum telah dilakukan, banyak kasus korupsi yang tidak berujung pada hukuman berat bagi para pelakunya. Lemahnya sistem peradilan, intervensi politik, hingga adanya celah dalam peraturan hukum sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman yang setimpal. Selain itu, fenomena korupsi juga diperburuk dengan budaya patronase dan nepotisme yang masih kental dalam sistem birokrasi di Indonesia, sehingga praktik suap dan penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang sulit diberantas sepenuhnya (Hukum *Online*, 2022).

Kasus korupsi dalam tata niaga timah di Indonesia yang terjadi antara tahun 2015 hingga 2022 merupakan salah satu skandal terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 300 triliun. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat dan pengusaha, termasuk mantan Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan pengusaha Harvey Moeis. Mereka diduga berkolusi untuk memfasilitasi kegiatan pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Selain kerugian finansial, aktivitas pertambangan ilegal ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang, dengan estimasi kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Pada Januari 2025, Kejaksaan Agung

menetapkan lima perusahaan tambang sebagai tersangka korporasi dalam kasus ini, yang diduga berkolusi dengan mantan eksekutif PT Timah untuk melakukan kegiatan pertambangan ilegal dan transaksi peleburan fiktif (Liputan6, 2024).

Selain Harvey Moeis, terdapat beberapa individu dan korporasi yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022. Suparta (SP) – Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT). Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara yang signifikan, termasuk kerugian finansial dan kerusakan lingkungan. (Idntimes, 2024)

Harvey Moeis merupakan seorang pengusaha yang lahir pada 30 November 1985 cukup dikenal luas di Indonesia, khususnya dalam industri pertambangan. Ia memiliki rekam jejak yang cukup signifikan dalam dunia bisnis dan sering dikaitkan dengan berbagai perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam. Selain itu, Harvey Moeis juga dikenal sebagai suami dari Sandra Dewi, seorang aktris dan figur publik ternama di Indonesia. Harvey Moeis memiliki pengalaman yang mendalam dalam bidang investasi dan manajemen bisnis. Keahliannya dalam mengelola portofolio bisnis telah membawanya menjadi salah satu pengusaha yang diperhitungkan di industri yang digeluti. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang mumpuni, Harvey Moeis terus berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pertambangan dan energi. (Kompas, 2024)

Kehidupan pribadinya juga turut menarik perhatian publik, terutama setelah pernikahannya dengan Sandra Dewi yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, berbagai aktivitas filantropi dan sosial yang ia lakukan bersama keluarganya semakin memperkuat citranya sebagai seorang pengusaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap aspek sosial dan kemanusiaan. Harvey Moeis, seorang pengusaha dan suami dari aktris Sandra Dewi, terlibat dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Kasus ini bermula ketika Harvey, yang berperan sebagai perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT), menjalin kerja sama dengan Direktur Utama PT Timah Tbk saat itu, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Mereka berkolusi untuk menyewa smelter secara ilegal guna memfasilitasi

aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2018–2019. Dalam skema ini, Harvey Moeis melobi pemilik smelter agar menyisihkan keuntungan dari hasil kerja sama ilegal tersebut (Kompas, 2025).

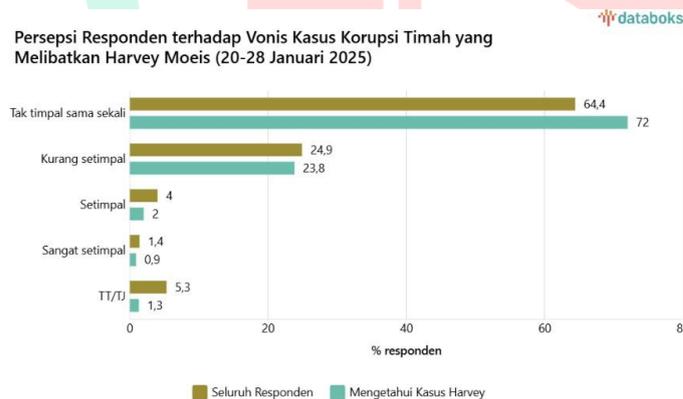
Keuntungan yang didapat kemudian disalurkan melalui dana corporate social responsibility (CSR) fiktif, yang dikelola bekerja sama dengan Helena Lim, pemilik PT Quantum Skyline Exchange. Perusahaan ini berperan sebagai penyalur dana untuk menyamarkan aliran uang hasil kejahatan. Keuntungan dari praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif, termasuk rusaknya ekosistem mangrove dan terumbu karang akibat eksploitasi timah yang tidak terkendali (Kompas, 2025). Kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis mendapat sorotan luas karena kerugian negara mencapai Rp300 triliun, tetapi vonis yang dijatuhkan hanya 6,5 tahun penjara serta denda Rp1 miliar (atau tambahan 6 bulan penjara jika tidak dibayar). Banyak pihak menilai hukuman ini terlalu ringan dan tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. (Kumparan, 2024).

Tidak puas dengan hasil vonis, Kejaksaan Agung mengajukan banding karena menganggap hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan. Pada Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Majelis hakim menilai Harvey memiliki peran penting dalam kasus korupsi ini, sehingga hukuman diperberat melebihi tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 12 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Harvey Moeis dan empat terdakwa lainnya berencana mengajukan kasasi karena tidak terima dengan hukuman yang diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kasus ini menyoroti besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian negara dan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang (CNN indonesia, 2024).



Gambar 1.1. Penangkapan Harvey Mouis oleh Penyidik KPK (CNN Indonesia, 2024)

Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas responden merasa vonis ini tidak setimpal. Sebanyak 64,4% dari seluruh responden dan 72% dari yang mengetahui kasus menganggap hukuman Harvey Moeis terlalu ringan. Sebanyak 24,9% dan 23,8% lainnya menilai vonis ini masih kurang setimpal, sementara yang menganggap hukuman sudah sesuai hanya 4% dan 2%. Bahkan, hanya 1,4% dan 0,9% yang menilai vonis ini sangat setimpal, sementara 5,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab (LSI.or.id, 2024).



Sumber:  
Lembaga Survei Indonesia

Informasi Lain:

Gambar 1.2. Persepsi Responden Terhadap Vonis Kasus Korupsi Timah (LSI, 2025)

Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa 74,6% responden mengetahui kasus korupsi tata kelola timah yang melibatkan Harvey Moeis, dengan perkiraan kerugian Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, 76,8% mengetahui bahwa Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, atau tambahan 6 bulan penjara jika tidak membayar denda. Secara keseluruhan, 58,7% responden menyadari vonis tersebut.

Mayoritas responden merasa hukuman itu tidak setimpal dengan perbuatannya, yakni 64,4% dari seluruh responden dan 72% dari yang mengetahui

kasus. Sementara itu, 24,9% dari seluruh responden dan 23,8% dari yang mengetahui kasus menilai vonisnya kurang setimpal. Hanya 4% dari seluruh responden dan 2% dari yang mengetahui kasus yang menganggap vonisnya sudah setimpal, sedangkan yang menilai sangat setimpal hanya 1,4% dan 0,9%. Responden yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 5,3% secara keseluruhan dan 1,3% dari yang mengetahui kasus. Survei ini melibatkan 1.220 responden yang memiliki hak pilih, dengan sampel acak dari seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei ini adalah 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara langsung pada 20-28 Januari 2025. (databoks.katadata.co.id, 2025).

Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, suami dari artis Sandra Dewi, dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada periode 2015–2022, telah menjadi sorotan utama di berbagai media nasional. Harvey Moeis divonis pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta dikenakan denda sebesar Rp1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Pemberitaan mengenai kasus ini tidak hanya muncul di Kompas.com dan MediaIndonesia.com, tetapi juga di berbagai media lain seperti:

Tabel 1.2. Data Jumlah Pemberitaan Media Nasional Tentang Kasus Korupsi Harvey Moeis

No	Media Nasional	Total Berita
1.	Kompas.com	150
2.	Liputan6.com	110
3.	Detik.com	73
4.	Tempo.co	7
5.	MediaIndonesia.com	39

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Pemilihan media Kompas.com dan MediaIndonesia.com dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan terhadap jumlah pemberitaan mengenai "*sidang vonis Harvey Moeis*" pada kurun waktu Desember 2024 hingga Februari 2025, serta pertimbangan metodologis terkait kriteria pemilihan sampel berita. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dari media yang dipilih, Kompas.com tercatat sebagai media dengan jumlah pemberitaan terbanyak mengenai kasus tersebut, yaitu sebanyak 150 berita dalam periode yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa Kompas.com secara konsisten mengikuti dan melaporkan perkembangan sidang vonis kasus Harvey Moeis, sehingga media ini dianggap representatif dalam

menggambarkan bagaimana isu tersebut dibingkai oleh media arus utama yang memiliki jangkauan luas dan kredibilitas tinggi.

Sementara itu, MediaIndonesia.com dipilih sebagai media pembanding karena meskipun jumlah beritanya relatif paling sedikit dibandingkan media lain yang juga memenuhi syarat (yaitu 39 berita), media ini tetap menyediakan minimal 10 berita yang dapat dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sebelumnya, Tempo.co sempat menjadi salah satu media yang dipertimbangkan. Namun, Tempo.co hanya memuat 7 berita terkait kasus ini selama periode penelitian, sehingga tidak memenuhi kriteria peneliti untuk dijadikan sampel analisis *framing*. MediaIndonesia.com dipilih karena secara struktural berada di bawah Media Group yang didirikan dan dipimpin oleh Surya Paloh, tokoh politik nasional sekaligus pendiri Partai NasDem. Afiliasi ini menjadikan MediaIndonesia.com memiliki kecenderungan redaksional yang pro-pemerintah dan pro-bisnis, yang tercermin dalam gaya pemberitaan yang cenderung normatif, mendukung stabilitas, serta tidak terlalu kritis terhadap kekuasaan. Karakter ini relevan untuk dianalisis karena berpotensi memengaruhi cara media membingkai isu korupsi, khususnya dalam kasus yang melibatkan aktor elite seperti Harvey Moeis.

Dengan memilih dua media dari sisi kuantitas pemberitaan yang kontras satu dengan jumlah pemberitaan tertinggi (Kompas.com) dan satu dengan jumlah pemberitaan lebih sedikit namun tetap memenuhi kriteria (MediaIndonesia.com) peneliti dapat mengeksplorasi secara lebih mendalam perbedaan gaya pembingkai berita, baik dari segi isi, struktur narasi, maupun penekanan isu sesuai dengan pendekatan *framing* Pan & Kosicki.

Pemilihan periode Desember 2024 hingga Februari 2025 merupakan rentang waktu yang krusial dalam proses hukum kasus korupsi Harvey Moeis yang melibatkan PT Timah Tbk. Pada 23 Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Harvey Moeis dengan hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Kemudian, pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dan meningkatkan uang pengganti menjadi Rp420 miliar (Kompas, 2024)

Kompas.com adalah portal berita digital yang diluncurkan oleh Harian Kompas melalui kelompok usaha Kompas Gramedia (KG Media). Situs ini resmi berdiri pada tanggal 14 September 1995 dengan nama Kompas *Online*, menjadikannya salah satu pelopor media *online* di Indonesia. Dalam lanskap media digital di Indonesia, Kompas.com menjadi salah satu situs berita paling populer dan paling banyak diakses oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari konsistensinya berada di peringkat atas media daring nasional dalam hal trafik pembaca dan volume produksi berita. Kompas.com juga dikenal memiliki gaya penyajian berita yang terstruktur, menggunakan bahasa jurnalistik yang formal, serta menjaga reputasi sebagai media arus utama (*mainstream media*) yang berpengaruh dalam pembentukan opini publik (Maulana & Hidayat, 2020).

Sementara itu, MediaIndonesia.com yang berada dalam naungan Media Group Network menunjukkan karakteristik pemberitaan yang lebih politis dan seringkali berpihak dalam konstruksi naratif terhadap isu-isu besar, termasuk isu hukum dan korupsi (Kurniawan, Sujoko, & Wulandari, 2024). Perbedaan ini memberi peluang untuk membandingkan *framing* dua media arus utama yang memiliki kecenderungan redaksional yang berbeda terhadap isu yang sama.

Kedua, intensitas peliputan Kompas.com dan MediaIndonesia.com selama periode Desember 2024 hingga Februari 2025 tergolong konsisten. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan data yang memadai dan relevan guna dianalisis menggunakan metode *framing* Pan & Kosicki yang menitikberatkan pada empat struktur: sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam teks berita (Pan & Kosicki, 1993). Selain itu, keduanya menyediakan berita secara lengkap dan terbuka di laman daring tanpa hambatan akses, sehingga memungkinkan peneliti menelaah konten secara utuh.

Ketiga, kedua media ini memiliki jangkauan nasional serta kredibilitas yang tinggi di mata publik dan kalangan akademisi. Reputasi tersebut dibangun melalui sejarah panjang, konsistensi pemberitaan, serta keberpihakan pada standar jurnalistik yang profesional. Media ini juga kerap digunakan sebagai objek dalam berbagai penelitian komunikasi politik karena dinilai mampu merepresentasikan kecenderungan *framing* media arus utama dalam merespons isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat (Putri & Chairil, 2024; Kurniawan et al., 2024).

Selain itu, keberadaan Kompas.com dan MediaIndonesia.com dalam peta media nasional menjadikannya relevan untuk dikaji secara ilmiah, terutama dalam konteks analisis wacana dan *framing*. Oleh karena itu, memilih Kompas.com dan MediaIndonesia.com sebagai bahan kajian tidak hanya mendukung validitas akademik, tetapi juga memperkuat relevansi penelitian ini, khususnya dalam memahami bagaimana media membentuk narasi atas kasus besar seperti dugaan korupsi yang melibatkan Harvey Moeis dan PT Timah sebagai BUMN strategis (Putri & Chairil, 2024; Kurniawan et al., 2024).

Sementara itu, MediaIndonesia.com adalah platform digital dari surat kabar harian Media Indonesia, yang terbit sejak 19 Januari 1970 dan merupakan bagian dari Media Group yang juga menaungi Metro TV. Media Indonesia dikenal memiliki orientasi politik dan ekonomi yang pro-pemerintah dan pro-bisnis, dengan fokus pada isu-isu politik, hukum, dan kebijakan public dan sebagai salah satu surat kabar tertua yang telah bertransformasi ke platform digital transformasi dari media cetak ke digital memungkinkan MediaIndonesia.com tetap relevan dalam menyajikan berita, dengan gaya penulisan yang lugas dan tegas, serta penyajian berita yang mendalam. Perbedaan karakteristik antara Kompas.com yang cenderung netral dan global dengan MediaIndonesia.com yang lebih konvensional dan berorientasi nasional memberikan ruang analisis *framing* yang lebih luas, sesuai dengan model Pan & Kosicki yang menelaah struktur dan penyusunan wacana berita secara mendalam. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang baru terjadi dan memiliki nilai informasi bagi masyarakat (Media Indonesia, 2025).



Gambar 1.3. Pemberitaan Sidang Vonis Kasus Harvey Moeis (Media Indonesia, 2024)

Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, berita harus mengandung

kebenaran, akurat, dan relevan bagi kepentingan publik. Berita biasanya disusun berdasarkan prinsip 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*) agar mudah dipahami oleh pembaca. berita adalah laporan tentang fakta atau ide terkini yang dipilih oleh staf redaksi untuk disiarkan dan dapat menarik perhatian pembaca. (Dja'far H assegaf, 2017).

Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang baru terjadi dan memiliki nilai informasi bagi masyarakat. Menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, berita harus mengandung kebenaran, akurat, dan relevan bagi kepentingan publik. Berita biasanya disusun berdasarkan prinsip 5W+1H (*What, Who, When, Where, Why, dan How*) agar mudah dipahami oleh pembaca. berita adalah laporan tentang fakta atau ide terkini yang dipilih oleh staf redaksi untuk disiarkan dan dapat menarik perhatian pembaca. (Dja'far H assegaf, 2017).

Jurnalisme *online* didefinisikan sebagai penyebarluasan informasi melalui situs web berita atau portal berita, yang merupakan bagian dari media internet, media *online*, atau media siber. Praktik ini juga dikenal dengan istilah *online journalism*, jurnalistik daring, *cyber journalism*, jurnalistik internet, atau jurnalistik web (Wendratama, 2017).

Konstruksi realitas dipahami sebagai proses dialektis yang terdiri dari tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Konsep ini merujuk pada bagaimana individu dan masyarakat secara bersama-sama membentuk dan memahami kenyataan sosial melalui interaksi dan pengalaman sehari-hari (Dharma, F. A., 2018). Dengan demikian, konstruksi realitas menurut Berger adalah hasil dari interaksi terus-menerus antara individu dan masyarakat, di mana kenyataan sosial dibentuk, diobjektifikasi, dan diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Dharma, F. A., 2018).

Metode *framing* yang dikembangkan oleh Pan & Kosicki (1993) merupakan pendekatan dalam analisis media untuk memahami bagaimana berita dikonstruksi oleh media. Model ini menekankan bahwa *framing* tidak hanya sekadar pemilihan kata atau sudut pandang, tetapi juga melibatkan struktur wacana dalam teks berita. Pan & Kosicki membagi analisis *framing* ke dalam empat struktur utama. Struktur sintaksis berkaitan dengan penyusunan berita secara teknis, seperti judul, *Lead*, dan paragraf awal yang menentukan bagian mana yang lebih ditonjolkan. Struktur skrip

melihat pola naratif berita berdasarkan elemen 5W+1H, yang membentuk kerangka cerita dan memengaruhi pemahaman pembaca. Strategi memproses dan konstruksi berita merupakan definisi *framing* menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Nisa, 2020)

Dalam memahami suatu peristiwa dan mengorganisasi informasi yang berkaitan dengan konvensi serta rutinitas dalam proses produksi berita, diperlukan penggunaan perangkat kognitif. Menurut Pan dan Kosicki, *framing* memiliki dua pendekatan yang saling berkaitan, yakni pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Bagaimana seseorang melakukan pengelolaan dan memproses sejumlah informasi dalam dirinya yang dibuat dalam skema tertentu merupakan konsepsi psikologi. Bagaimana suatu peristiwa ditafsirkan oleh seseorang melalui cara pandang tertentu disebut sebagai konsepsi sosiologis. Untuk mengerti diri sendiri dan realitas yang ada di luar diri, seseorang harus mampu melakukan penafsiran, pengklasifikasian dan pengorganisasian tentang pengalaman sosial dirinya sendiri (Nisa, 2020).

Analisis *framing* adalah metode untuk memahami bagaimana media membentuk realitas melalui proses seleksi dan penekanan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa. Melalui *framing*, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan cara audiens memahami isu tersebut. Proses ini melibatkan pemilihan fakta, penggunaan bahasa, dan struktur penyajian berita yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu (Nugroho, Eko Harry Susanto., 2016).

Pemilihan berita mengenai *framing* sidang vonis kasus korupsi Harvey Moeis pada PT Timah pada periode Desember 2024 - Februari 2025 relevan karena isu korupsi tetap menjadi perhatian utama di Indonesia, terutama dalam konteks pengaruhnya terhadap perekonomian dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana media membingkai peristiwa yang melibatkan tokoh publik, yang bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap masalah hukum dan integritas. *Framing* yang dilakukan media dapat memperlihatkan bagaimana konstruksi naratif dibangun, apakah menonjolkan sisi negatif, seperti kerugian negara, atau sisi positif, seperti upaya pembersihan sistem. Dengan mengamati *framing* ini, kita dapat lebih memahami bagaimana media

berperan dalam membentuk opini publik terhadap isu korupsi di Indonesia (Putri, Y.D., 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra Setiawan dan Neng Tika Harnia (2021) menganalisis *framing* pemberitaan vonis koruptor dana bansos COVID-19 oleh media *online* suara.com dan Kompas.com menggunakan model Pan & Kosicki. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan gaya pemberitaan, di mana suara.com cenderung menggunakan judul yang sarkastik sementara Kompas.com memilih penyampaian yang lebih netral. Perbedaan utama dengan skripsi ini terletak pada fokus kasus dan media yang dianalisis; penelitian tersebut membandingkan dua media dalam kasus bansos, sementara penelitian ini menyoroti pemberitaan berbagai media nasional terhadap sidang vonis Harvey Moeis dalam kasus korupsi PT Timah.

Penelitian oleh Rizka Maulida (2022) membahas *framing* pemberitaan vonis kasus korupsi Bupati Kudus M. Tamzil di media *online* detik.com dan kompas.com dengan menggunakan analisis Pan & Kosicki. Temuan riset ini menunjukkan bahwa kedua media memiliki fokus pemberitaan berbeda—detik.com menyoroti aspek hukum dan sanksi pidana, sedangkan kompas.com lebih menekankan respons publik terhadap vonis. Perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada objek kasus dan pendekatan media; penelitian Rizka fokus pada korupsi kepala daerah, sementara skripsi ini menyoroti *framing* media nasional terhadap vonis kasus korupsi sektor tambang oleh Harvey Moeis.

Sementara itu, penelitian oleh Amira Lutfiana (2023) mengkaji pemberitaan sidang vonis kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah melalui media *online* Tribunnews.com dan Liputan6.com. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua media memiliki strategi *framing* yang berbeda dalam menyajikan berita, dengan Tribunnews.com lebih menekankan pada pengaruh politik, sementara Liputan6.com lebih menyoroti dampak sosial dari vonis tersebut. Perbedaannya dengan skripsi ini terletak pada jenis kasus yang diteliti, di mana penelitian Amira fokus pada kasus pejabat daerah, sedangkan skripsi ini lebih memfokuskan pada *framing* pemberitaan sidang vonis kasus korupsi sektor industri timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis.

Penelitian mengenai pembingkai media dalam kasus korupsi yang

melibatkan Harvey Moeis telah dilakukan sebelumnya oleh Fathurrahman Novatrianda dan Nawiroh Vera (2024) dalam artikel berjudul "*Analysis News Framing of Alleged Corruption Cases Representative of PT Timah Refined Bangka Tim (RBT) Harvey Moeis in Mass News Kompas.com*". Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal ArtComm dan menggunakan model *framing* dari Robert N. Entman untuk menganalisis tiga berita yang diterbitkan oleh Kompas.com pada 27 Maret 2024, bertepatan dengan penahanan Harvey Moeis oleh Kejaksaan Agung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media membingkai kasus ini sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap pelaku korupsi serta sebagai langkah moral untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi awal dalam memahami cara media membingkai kasus Harvey Moeis, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi perbedaan. Pertama, cakupan waktu penelitian tersebut sangat terbatas, hanya berfokus pada momen penahanan di bulan Maret 2024. Kedua, jumlah berita yang dianalisis sangat sedikit, yakni hanya tiga berita dari satu media. Ketiga, model analisis yang digunakan (Entman) lebih fokus pada elemen makro seperti problem definition dan moral evaluation, tanpa membedah struktur teks secara lebih mendalam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan model *framing* Pan & Kosicki yang memungkinkan analisis lebih rinci terhadap struktur teks berita, termasuk aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Selain itu, penelitian ini menganalisis dua media daring nasional, yaitu Kompas.com dan MediaIndonesia.com, yang dipilih berdasarkan intensitas peliputan yang paling tinggi dan paling rendah dalam periode Desember 2024 hingga Februari 2025 yakni periode penting yang mencakup sidang vonis dan putusan banding Harvey Moeis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat bagaimana perbedaan intensitas dan orientasi media berpengaruh terhadap pemingkai sebuah isu besar di ruang publik.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana pembingkaiian pemberitaan sidang kasus korupsi Harvey Moeis dalam Kompas.com dan MediaIndonesia.com berdasarkan metode Pan & Kosicki pada periode Desember 2024 – Februari 2025?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pembingkaiian pemberitaan sidang kasus korupsi Harvey Moeis di Kompas.com dan MediaIndonesia.com

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Penelitian ini memberikan Penelitian ini membandingkan pemberitaan Kompas.com dan MediaIndonesia.com untuk melihat perbedaan *framing* dalam kasus sidang korupsi Harvey Moeis, serta dapat menjadi landasan bagi studi penelitian selanjutnya di bidang media dan politik.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini membantu para pembaca pemberitaan mengenai Harvey Moeis dalam memahami bagaimana media membentuk persepsi publik agar lebih kritis dalam mengonsumsi berita. Bagi jurnalis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam evaluasi dalam menyajikan pemberitaan yang lebih objektif.